

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Untuk memahami kinerja suatu perusahaan termasuk UMKM perlu dilakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Manajer dan pemangku kepentingan membutuhkan laporan ini sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut PSAK No.1 (2015), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas”. Selanjutnya Menurut Kasmir (2018), “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.” Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Menurut Kasmir (2018), Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Pengguna informasi tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan secara lebih rinci Kasmir (2018), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas mengenai tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang status keuangan dan kinerja suatu entitas perusahaan.

2.1.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok. Adapun empat karakteristik kualitatif pokok menurut PSAK 2015 No.1 yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat dipahami
- b. Relevan
- c. Keandalan
- d. Dapat Diperbandingkan

Berikut merupakan uraian dari karakteristik diatas :

- a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk

maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. Relevan

Informasi yang berguna harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, atau masa depan, mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil penilaian masa lalu mereka. Peran informasi dalam prediksi dan penegasan saling terkait. Informasi yang sama juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi prakiraan masa lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi tentang status dan kinerja keuangan masa lalu biasanya digunakan sebagai dasar untuk meramalkan status dan kinerja keuangan masa depan.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal karakteristik berikut:

i. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi

keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

ii. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

iii. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

iv. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau

penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu, tidak mempunyai kualitas andal.

v. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan area itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

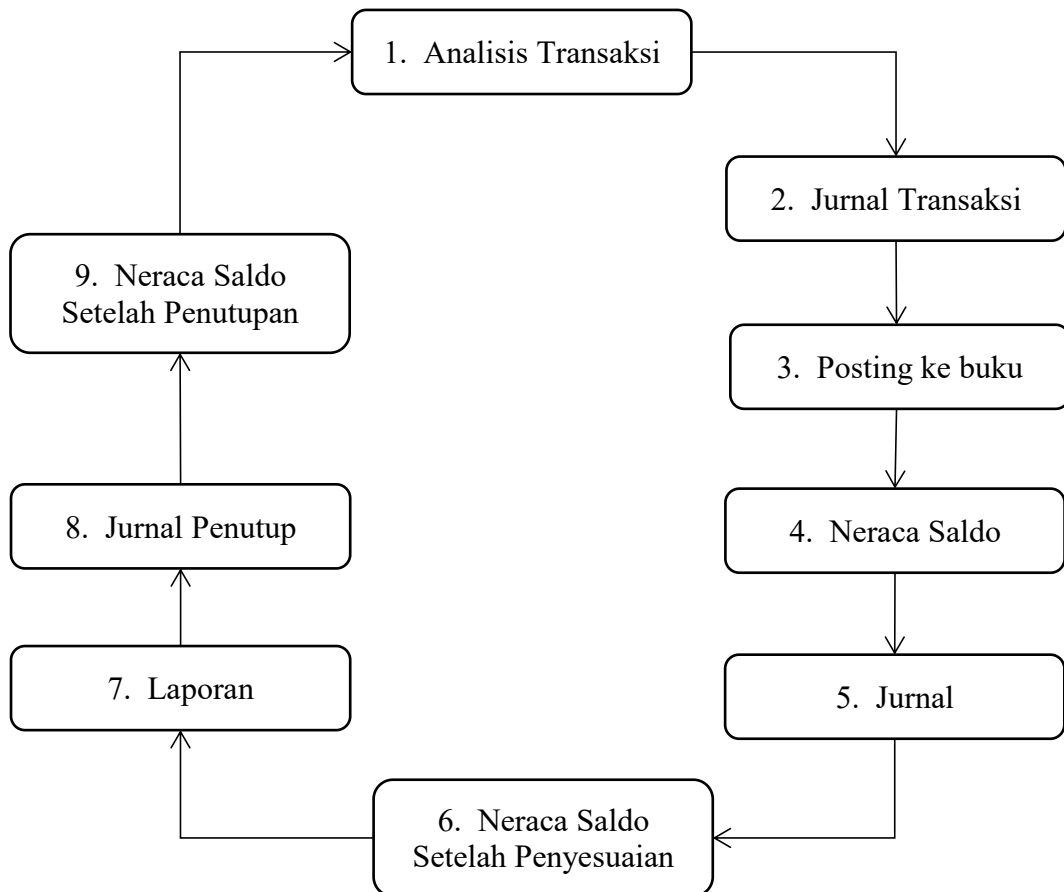
d. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*fraud*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama, dan untuk entitas yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

2.2. Siklus Akuntansi

Pada akuntansi terdapat siklus akuntansi yang berisi tahapan peristiwa akuntansi yang dilakukan dari awal sampai akhir tanpa putus seperti lingkaran sehingga menyajikan sebuah laporan keuangan yang berguna bagi pemutusan hasil akhir yang akan diambil usaha (Kartomo & Sudarman, 2019). Sedangkan

Menurut Hantono & Rahmi (2018), terdapat tiga tahapan dalam siklus akuntansi yaitu tahapan pencatatan, tahapan pengikhtisaran dan tahapan pelaporan. Adapun gambar dari siklus akuntansi sebagai berikut :



Sumber : Sodikin dan Riyono (2014)

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

Berikut merupakan uraian mengenai tahapan Siklus Akuntansi:

1. Dimulai dari mendokumentasi transaksi - transaksi keuangan dalam bukti transaksi dan melakukan Analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam Buku Jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas, dalam Buku Besar, transaksi - transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.

4. Menentukan saldo - saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam Neraca Saldo.
5. Menyesuaikan buku besar berdasar pada informasi yang paling *up-to-date* (mutakhir).
6. Menentukan saldo - saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP).
7. Menyusun Laporan Keuangan berdasar Neraca Saldo Setelah Penyesuaian.
8. Menutup Buku Besar.
9. Menentukan saldo - saldo buku besar dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah tutup buku.

2.3. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.

2.3.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria Usaha Mikro sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria Usaha kecil sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Adapun kriteria usaha menengah berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.4. Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (SAK-EMKM)

2.4.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (SAK-EMKM)

SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang telah berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara eksplisit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM, sebuah entitas juga harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas tersebut, dan antara usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya (SAK EMKM, 2018)

2.4.2 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Dasar pengakuan unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk membeli aset tersebut pada saat pembelian. Biaya historis liabilitas mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan dibayar dalam kegiatan usaha normal untuk memenuhi liabilitas tersebut. Pengakuan unsur

laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos aset, liabilitas, pendapatan dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas.
- b. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

2.4.3 Kontribusi UMKM

Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM memberi berbagai jenis kontribusi, antara lain sebagai berikut :

1. Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional ; pada tahun 2019, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 119.562.843 orang atau 96,92% dari total penyerapan tenaga kerja, jumlah ini menurun sebesar 0,08 % dari tahun sebelumnya.
2. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ; PDB Nasional atas dasar harga berlaku :
 - a. Tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp. 9.062.581,3 Milyar atau sebesar 61,07% .
 - b. Tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 9.580.762,7 Milyar atau sebesar 60,51% .
3. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Investasi Nasional ; Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku :
 - a. Tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.564.549,5 triliun atau sebesar 60,42% .
 - b. Tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.619.382,0 Milyar atau sebesar 60,03% .

2.5. Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) laporan keuangan minimum terdiri dari 3 unsur, yaitu : laporan laba rugi selama periode, laporan posisi keuangan pada akhir periode, dan catatan atas laporan keuangan (SAK EMKM, 2018).

1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang akan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan biaya dari suatu entitas. Berdasarkan SAK EMKM (2018) laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Beban pajak.

Berikut penjelasan dari pos-pos di atas :

- a. Pendapatan merupakan perolehan aset atau sumber ekonomi dari pihak lain sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa. Pendapatan dapat dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha. Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Sedangkan pendapatan diluar usaha merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan diluar usaha seperti, pendapatan sewa dan pendapatan bunga.
- b. Beban keuangan merupakan pengorbanan dalam berkurangnya aset perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Yang termasuk dalam beban keuangan ialah beban gaji, beban listrik, beban air, beban iklan, dan beban lainnya.
- c. Beban pajak menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode.

Entitas dapat menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. Berdasarkan SAK EMKM (2018) perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Format Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM 2018 dapat dilihat pada halaman 21.

2. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang akan menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dari suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan. Berdasarkan SAK EMKM (2018) unsur-unsur tersebut disajikan Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset tetap
- e. Utang usaha
- f. Utang bank
- g. Ekuitas

Berikut penjelasan dari pos-pos di atas :

- a. Kas dan setara kas. Dibandingkan dengan aset lainnya, kas merupakan aset yang paling likuid. Keberadaan kas sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi, investasi dan pembiayaan guna mencapai tujuan perusahaan. Adapun pengertian setara kas menurut PSAK 2 adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan

dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas terdiri dari uang tunai dan saldo rekening koran perusahaan di bank. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Saldo perusahaan di bank dapat berupa rekening koran atau tabungan perusahaan di bank.

- b. Piutang. Menurut Hery (2017) Piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha, dan memungkinkan piutang wesel) memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur, dan piutang Bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kepada pihak lain (untuk piutang pajak).
- c. Persediaan. Persediaan atau biasa dikenal dengan *Inventory* ini merupakan simpanan barang atau bahan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan ini dapat mencegah resiko apabila terjadi keterlambatan barang tiba serta dapat mencegah terhentinya proses produksi akibat kehabisan persediaan. Untuk sistem pencatatan persediaan ini terbagi menjadi 2, yakni sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan perpetual.
- d. Aset tetap. Aset tetap (*Fixed Asset*) menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2017) adalah Aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin.
- e. Utang usaha. Menurut Hantono (2018), “Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang terdiri dari 2 jenis yakni, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun, seperti utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang pajak. Sedangkan utang jangka

panjang umumnya harus dikembalikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti utang obligasi.

- f. Utang bank. Utang bank merupakan utang yang timbul akibat pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan.
- g. Ekuitas. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Adapun unsur ekuitas yakni, modal yang disetor, keuntungan yang tidak dibagi, modal sumbangan, modal penilaian kembali, dan modal lainnya.

Suatu entitas dapat menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM juga tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Walaupun demikian, dalam SAK-EMKM (2018) entitas bisa menyajikan pos-pos dari kategori aset tersebut sesuai urutan likuiditasnya dan menyajikan pos-pos utang sesuai dengan urutan jatuh tempo pembayarannya. Format Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM 2018 dapat dilihat pada halaman 22.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam SAK EMKM (2018) Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berupa informasi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan memuat informasi sebagai berikut :

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi lain dan informasi rinci yang akan ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan tergantung pada jenis usaha yang dijalankan entitas tersebut. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dalam ruang lingkup yang sebenarnya. Setiap pos dalam laporan keuangan dikaitkan dengan informasi yang relevan dalam catatan atas laporan keuangan. Format Catatan atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM 2018 dapat dilihat pada halaman 23.

Format Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM 2018:

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7			
	CATATAN	20X8	20X7
PENDAPATAN			
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber : SAK EMKM, 2018

Format Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM 2018:

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7			
	CATATAN	20X8	20X7
ASET			
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber : SAK EMKM, 2018

Format Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM 2018:

<p>ENTITAS</p> <p>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</p> <p>31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7</p>
<p>1. UMUM</p> <p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p> <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.</p> <p>e. Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p> <p>f. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.</p> <p>g. Pajak Penghasilan Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p>

ENTITAS		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7		
3. KAS		
	20X8	20X7
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx
4. GIRO		
	20X8	20X7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
5. DEPOSITO		
	20X8	20X7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga – Rupiah	4,50%	5,00%
6. PIUTANG USAHA		
	20X8	20X7
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
	20X8	20X7
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
8. UTANG BANK		
<p>Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rp xxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.</p>		

ENTITAS		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7		
9. SALDO LABA		
Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	20X8	20X7
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN-LAIN		
	20X8	20X7
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	20X8	20X7
Pajak penghasilan	xxx	xxx

Sumber : SAK EMKM, 2018

2.6. Perbedaan SAK-ETAP dengan SAK-EMKM

SAK EMKM 2018 merupakan standar yang dapat disebut sebagai pembenahan dan penyempurnaan SAK ETAP. Pelaku UMKM dan pembaca sepakat bahwa SAK ETAP merupakan standar yang masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, SAK EMKM telah memperbaharui beberapa isi dan peraturan yang terdapat dalam SAK ETAP agar sesuai dengan pelaku usaha UMKM, sehingga terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu:

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SAK ETAP berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, artinya entitas yang tidak memiliki akuntabilitas di sektor publik dan tidak mempublikasikan atau menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan publik dan eksternal. Pada saat yang sama, SAK EMKM berlaku untuk usaha kecil, menengah dan mikro yang tidak memikul akuntabilitas publik yang signifikan sesuai dengan SAK ETAP, sesuai dengan klasifikasi usaha kecil, menengah dan mikro dalam perundang-undang di Indonesia. Berbeda dengan SAK ETAP, SAK EMKM dapat diterapkan pada entitas yang tidak memenuhi/tidak memenuhi definisi dan memenuhi semua standar, dengan syarat dokumen tersebut telah disetujui oleh otoritas yang berwenang.

b. Pengukuran dalam laporan keuangan

Dalam pengukurannya SAK EMKM didasarkan pada dasar pengukuran biaya historis, yaitu semua aset ditentukan berdasarkan kas atau setara kas dalam jumlah kas yang dibayarkan pada saat memperoleh aset atau membeli aset, dan liabilitas ditentukan berdasarkan setara kas yang telah diterima atau dibayarkan seperti yang diharapkan untuk melaksanakan kewajiban dalam kegiatan usaha normal. Selain menggunakan biaya historis, SAK ETAP juga dapat menggunakan metode nilai wajar untuk pengukurannya, yaitu nilai wajar ditentukan berdasarkan jumlah yang digunakan untuk mempertukarkan aset dan melikuidasi kewajiban antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi tersebut.

c. Prinsip dan Konsep Pervasif

Pada prinsipnya tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP dan SAK EMKM tidak berbeda, yaitu untuk memberikan informasi tentang status keuangan dan kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas, dan diharapkan sebagian besar entitas akan mendapat manfaat untuk para pengguna. Seperti halnya pengambilan keputusan ekonomi, siapa saja yang tidak hadir dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan. Perbedaannya adalah SAK EMKM secara khusus memberikan informasi tambahan, yang menunjukkan bahwa target pengguna termasuk penyedia sumber daya, seperti Investor atau Kreditor entitas.

d. Laporan keuangan

Laporan keuangan SAK EMKM jauh lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP. Persyaratan minimum SAK EMKM meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan yang dicatat pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi yang dicatat selama periode;
- c. Catatan atas laporan keuangan, berisi semua rincian, tambahan yang perlu pada akun-akun relevan tertentu.

SAK ETAP memiliki standar yang lebih minimum untuk laporan keuangan, yang tidak hanya tiga hal tersebut, tetapi juga mensyaratkan adanya laporan perubahan ekuitas yang harus mencakup semua perubahan ekuitas dan / atau ekuitas yang ada, serta perubahan lain yang muncul dari transaksi dengan pemilik yang dalam kapasitasnya sebagai seorang pemilik, serta juga memerlukan laporan arus kas.